

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **1.1 Paparan Data Penelitian**

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian berupa data dan informasi yang telah dihimpun peneliti melalui kegiatan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data dan informasi yang dipaparkan berkaitan dengan implementasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di pesisir Teluk Lampung. Data tersebut dideskripsikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu: (1) Pendidikan anak usia pendidikan dasar pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, (2) Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, (3) Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Betung Barat terhadap terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, (4) Faktor-faktor pendukung terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung dan (5) Kendala dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

### **1.1.1 Gambaran Latar Penelitian**

Wilayah penelitian ini terletak di kota Bandar Lampung provinsi Lampung, yaitu pada koordinat 5°25'46.6"S 105°15'45.26"E. Hari jadi kota ini adalah tanggal 17 Juni 1982 dan dibentuk dengan dasar hukum PP No. 24 tahun 1983 dengan ibukota Tanjung Karang. Luas keseluruhan kota Bandar Lampung adalah 197,22 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 879,651 orang pada tahun 2010. Suku bangsa yang banyak terdapat di kota ini antara lain Jawa, Lampung, Sunda, Palembang, Bali dan sebagainya.

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota sekaligus ibukota provinsi Lampung. Secara geografis kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta. Oleh karena itu kota ini memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan serta perekonomian di provinsi Lampung.

Topografi kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung. Topografi tiap-tiap wilayah di kota ini adalah sebagai berikut: (a) Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian selatan, (b) Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame bagian utara, (c) Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung Utara dan (d) Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat, yaitu wilayah Gunung Betung,

Sukadanaham, dan Gunung Dibalau. Di kota ini terdapat Pelabuhan Panjang yang juga merupakan pelabuhan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa.

Kawasan pesisir merupakan wilayah kegiatan transportasi dan urat nadi perekonomian. Bahkan banyak kota yang tumbuh dan berkembang pesat di wilayah pesisir berawal dari pesatnya aktivitas pelabuhan. Dalam konteks kota Bandar Lampung, kawasan pesisirnya cukup unik karena berada dalam wilayah Teluk Lampung dan membentuk huruf U dengan panjang garis pantai sekitar 27 kilometer. Di dalamnya terdapat kawasan industri dan pergudangan (Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Barat dan kawasan permukiman (Teluk Betung Barat). Letak kedua kawasan ini sangat berdekatan serta saling berhubungan. Kecamatan Teluk Betung Barat memiliki fungsi sebagai pemerintahan kota, wisata pantai, industri hasil laut, resapan air, pelabuhan perikanan dan minapolitan, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa.

Kecamatan Teluk Betung Barat memiliki penduduk yang heterogen terutama dari latar belakang suku. Dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan mayoritas penduduk di daerah ini adalah masyarakat pendatang seperti suku Sunda, Jawa, Jawa-Serang, Bugis dan Flores. Meskipun demikian masih banyak terdapat masyarakat asli Lampung di daerah ini. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No.	Rentang Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	3071	3158	6229
2	5 – 6	2629	2608	5237
3	7 – 13	4333	4276	8609
4	14 – 16	3445	3381	6826
5	17 – 24	5226	5037	10263
6	25 – 54	8731	9530	18261
7	55 tahun ke atas	4550	2770	7320
	Jumlah	31985	30760	62745

Sumber: Data Sekunder dari Sekretaris Camat Teluk Betung Barat.

Dari tabel di atas terlihat bahwa di kecamatan ini penduduk usia produktif, yaitu penduduk yang berusia antara 15 – 64 tahun lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Penduduk usia produktif ini banyak yang mencari nafkah sebagai nelayan. Selain itu ada juga masyarakat pesisir Teluk Lampung yang hidup dengan mengolah ikan hasil tangkapan mereka. Di kecamatan ini banyak masyarakat yang menjadi buruh atau kuli atau menjadi tenaga kerja pada pabrik-pabrik yang banyak terdapat di daerah ini. Sedangkan di sekitar pasar-pasar tradisional banyak masyarakat yang mencari nafkah dengan menjadi pedagang dan kuli panggul. Masyarakat yang tinggal di pinggir jalan banyak yang membuka kios atau toko.

Berikut ini adalah tabel komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin.

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	515	252	767
2	TNI	365	14	379
3	Dagang	2986	2892	5878
4	Tani	2909	2018	4927
5	Tukang	1666	836	2502
6	Buruh	8022	7581	15603
7	Pensiunan	312	208	520
8	Lain-lain	15210	16959	32169
	Jumlah	31985	30760	62745

Sumber: Data Sekunder dari Sekretaris Camat Teluk Betung Barat.

Mayoritas penduduk di kecamatan ini adalah lulusan sekolah dasar, disusul lulusan SMP dan SMA. Sedangkan penduduk yang lulus Strata 1 adalah kelompok yang paling sedikit jumlahnya. Berikut ini tabel komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin.

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana	457	331	788
2	Sarjana Muda	1020	1018	2038
3	SMA	6400	6315	12715
4	SMP	6859	6496	13355
5	SD	9760	9482	19242
6	TK	961	1046	2007
7	Belum Sekolah	5988	5585	11573
8	Buta Huruf	540	487	1027
	Jumlah	31985	30760	62745

Sumber: Data Sekunder dari Sekretaris Camat Teluk Betung Barat

## **1.2 Paparan Data**

Peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan berdasarkan pada 5 fokus penelitian, yaitu: (1) Pendidikan Dasar pada Masyarakat Pesisir, (2) Sarana dan prasarana pendidikan yang ada, (3) Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan, (4) Faktor-faktor pendukung terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan (5) Kendala yang ada dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Informasi yang didapatkan dari wawancara, observasi dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

### **1.2.1.1 Pendidikan Dasar pada Masyarakat Pesisir**

Berdasarkan data sekunder yang didapat dari Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menyarankan agar menanyakan langsung kepada Kepala Tata Usaha, maka pendidikan anak usia pendidikan dasar di daerah pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Jumlah Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Penelitian.

No.	Jenjang Pendidikan	Siswa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar (SD)	3631	3356	6987
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	779	806	1585
Jumlah		4410	4162	8572

Sumber: Data Sekunder dari Kepala Tata Usaha di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Betung Barat.

Dari data di atas terlihat bahwa pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar jumlah siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Hal ini mungkin diakibatkan oleh tingkat kelahiran bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan pada kurun waktu tertentu. Namun mungkin juga disebabkan kecenderungan orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama jumlah siswa perempuan lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki.

Pendidikan untuk anak usia sekolah di wilayah penelitian sudah dirasa sebagai hal yang penting bagi orang tua. Hal ini terungkap dari wawancara terhadap informan berikut:

“Masyarakat di sini sudah menganggap pendidikan itu penting sehingga mereka mau menyekolahkan anak-anak mereka, paling tidak sampai SMP.”  
(w.kupt.F1.200712)

“Kemudian, dukungan dari orang tua murid juga cukup tinggi. Karena kita ini di wilayah pesisir maka kadang-kadang ada satu dua orang sewaktu ujian yang harus dijemput. Sama juga dengan Teluk Betung Selatan dan Panjang. Tapi tidak

banyak, karena alasan orang tua adalah membantu pekerjaan orangtua di laut. Tapi istilahnya tingkat dukungan orang tua murid terhadap pendidikan sudah cukup tinggi. Sekarang ini tidak ada lagi istilahnya orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya. Mungkin masih kalah kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, tapi yaaa, sudah lumayanlah.”

(w.p.F1.021112)

“Sekarang kan dari media, misalnya TV... sudah banyak yang masuk ke nelayan, juga banyak relawan-relawan masuk. Jadi kalau bisa anak-anak jangan seperti sayalah, harus sekolah, harus lebih baik.”

(w.ot.F1.31102012)

“Karena faktor biaya dan lingkungan banyak anak di lingkungan itu tidak sekolah. Sebenarnya mereka pengen sekolah lagi tapi karena tidak ada biaya, mereka jadi menyesal sekali karena tidak bisa sekolah. Mereka bilang supaya saya tidak menyia-nyiakan sekolah saya, saya saja ingin sekolah, katanya. Anda harus sekolah yang rajin, kalau anda seperti saya nanti pasti menyesal.”

(w.s2.F1.29102012)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa penduduk di kecamatan Teluk Betung Barat sudah menganggap pendidikan sebagai hal yang penting. Oleh karena itu mereka memberi dukungan pada anak-anak mereka untuk sekolah. Dari media seperti televisi dan radio mereka juga mengetahui bahwa dengan pendidikan mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

#### **1.2.1.2 Sarana dan prasarana pendidikan**

Dari hasil observasi ke lapangan, sarana dan prasarana pendidikan di daerah pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung pada umumnya dalam kondisi baik. Beberapa bangunan sekolah yang penulis kunjungi sebagai sampel berada di lingkungan yang dekat jalan raya dan lingkungan padat penduduk sehingga mudah dijangkau masyarakat. Sekolah dasar

maupun sekolah menengah pertama tersebut sudah dibangun secara permanen dan memiliki fasilitas yang cukup memadai.

Berdasarkan data sekunder yang didapat dari Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menyarankan agar menanyakan langsung kepada Kepala Tata Usaha, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Penelitian.

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		Ruang Kelas	Rombel
1	Sekolah Dasar (SD)	124	219
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	42	47
Jumlah		166	266

Sumber: Data Sekunder dari Kepala Tata Usaha di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Betung Barat.

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah rombongan belajar jauh lebih banyak daripada jumlah ruang kelas. Untuk tingkat Sekolah Dasar hal ini dimungkinkan karena untuk kelas 1 dan 2 hanya belajar selama kurang dari 3 jam sehingga pada siang hari ruang kelasnya masih bisa dimanfaatkan untuk rombongan belajar yang lain. Sarana dan prasarana di kecamatan ini pada umumnya sudah cukup memadai. Hal tersebut seperti diungkapkan informan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup untuk menampung siswa yang ada di daerah ini. Tapi untuk beberapa sekolah memang masih kekurangan ruang belajar sehingga mengajukan permohonan untuk pembangunan ruang kelas baru atau renovasi. Untuk data akurat kita punya datanya.

(w.kupt.F2.200712)

“Menurut saya kualitasnya cukup baik, keadaan ruang sekolah cukup baik, fasilitas sekolah cukup baik. Waktu saya SD belum ada perpustakaan tapi sekarang sudah ada. Gedung olahraga juga sudah ada”

(w.s2.F2. 291012)

“Kalau sekarang SD saya sudah lumayanlah sudah lebih maju. SMP saya juga sudah ada kemajuan. SD saya dulu (SD Generasi Muda, TBS) kata orang-orang bekas gudang yang dijadikan sekolah.”

(w.s2.F2. 291012)

Meskipun demikian sekolah-sekolah di kecamatan ini masih membutuhkan fasilitas seperti hasil wawancara berikut ini:

“...kalau gedung sekolah dan lokal kelas kita cukup baik, tapi kita belum punya laboratorium bahasa..”

(w.ks.F2.05112012)

Hal tersebut didukung dengan hasil observasi di lapangan bahwa memang sekolah-sekolah di kecamatan ini belum memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Keadaan ini terutama sangat mencolok di sekolah-sekolah swasta. Dari hasil pengamatan ke sebuah sekolah swasta, ruang belajarnya dipakai bergantian untuk SMP dan SMA. Juga sangat tidak memadai untuk menampung semua siswa karena satu ruang belajar bisa diisi oleh lebih dari empat puluh orang siswa. Demikian pula ruang perpustakaan berukuran sangat sempit dan tidak dilengkapi dengan ruang baca sehingga siswa tidak dapat membaca buku dengan nyaman di sana.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Teluk Betung Barat masih harus diperbaiki. Hal ini terutama berlaku untuk sekolah-sekolah swasta yang harus menutupi sendiri biaya operasional sekolahnya. Di sisi lain jika sekolah tersebut sudah mendapatkan dana BOS maka tidak boleh menarik iuran apapun dari siswa. Padahal sebagian besar dana BOS sudah habis untuk menggaji guru dan biaya operasional sehingga porsinya sedikit sekali untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

#### **1.2.1.3 Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT diketahui bahwa UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Betung Barat tidak melakukan lagi sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena program ini sudah berjalan lama. Sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kota, maka semua informasi yang berkaitan dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah disampaikan langsung kepada kepala sekolah. Pada intinya, sekolah harus menerima semua siswa berusia 7 sampai 12 tahun yang mendaftar ke sekolah tersebut.

Dinas Pendidikan Kecamatan juga tidak memberikan bantuan berupa uang kepada sekolah untuk mendukung terlaksananya program ini. Hal ini dikarenakan semua bantuan dari pemerintah sudah langsung disalurkan lewat sekolah. Meskipun demikian Dinas Pendidikan Kecamatan tidak lepas tangan terhadap berjalannya program ini. Mereka masih melakukan pembinaan kepada sekolah binaan mereka, yaitu kepada kepala sekolah, guru dan tenaga tata usaha. Kegiatan ini biasanya

dilakukan di awal tahun ajaran dengan melibatkan pengawas pembina di kecamatan tersebut.

Berikut hasil wawancara pada informan berikut ini:

“Pada dasarnya kami adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, jadi kami hanya menyampaikan informasi saja kepada sekolah-sekolah. Misalnya, sekolah wajib menerima siswa berumur 7 – 12 tahun yang mendaftar ke sekolah, mereka tidak boleh ditolak. Kalau bantuan berupa dana/uang itu tidak ada, karena pemerintah langsung menyalurkannya kepada sekolah, tidak lewat UPT Kecamatan. Tapi kalau bantuan berupa pembinaan pasti ada. Di awal tahun ajaran baru kami biasanya mengadakan pembinaan akademik kepada guru-guru. Ini dilakukan oleh pengawas pembina yang ada di UPT ini.  
(w.kupt.F3.200712)

“Yang pertama pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah yang mencakup 8 standar nasional pendidikan. Pengawas juga melakukan supervisi. Setiap sekolah minimal sekali dalam sebulan dengan melihat beban kerja pengawas.”  
(w.p1.F3. 021112)

Matriks 4.1 Peran UPT Dinas Pendidikan Kecamatan

Komponen	Keadaan
Peran UPT Dinas Pendidikan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan sosialisasi kepada sekolah.</li> <li>2. Semua informasi mengenai Wajib Belajar sudah langsung disampaikan Dinas Pendidikan Kota kepada Kepala Sekolah.</li> <li>3. Pemberian bantuan kepada sekolah hanya yang bersifat pembinaan, bukan materi.</li> <li>4. Melalui pengawas pembina UPT melakukan pembinaan minimal satu kali dalam sebulan dengan melihat beban kerja pengawas.</li> <li>5. Supervisi dilakukan satu kali dalam sebulan dengan melihat beban kerja pengawas.</li> </ol>

Hal yang harus ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan oleh Dinas Pendidikan Kota kepada sekolah hendaknya melibatkan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.</li> <li>2. Pembinaan terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi harus menjadi suatu program yang rutin dilakukan.</li> </ol>
-----------------------------	---

#### **1.2.1.4 Faktor-faktor Pendukung Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Yang menjadi faktor-faktor pendukung terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ini antara lain adanya bantuan langsung dari pemerintah seperti BOM dan BOS, tenaga pengajar yang mayoritas sudah sarjana dan adanya peran serta masyarakat. Seperti yang disampaikan informan berikut:

“Masyarakat di sini sudah menganggap pendidikan itu penting sehingga mereka mau menyekolahkan anak-anak mereka, paling tidak sampai SMP. Selain itu tenaga guru juga cukup banyak dan mayoritas adalah sarjana, jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.”  
(w.kupt.F4.200712)

“Ada bantuan dari pemerintah, seperti BSM dan BOS, juga bantuan buku, seragam dan sepatu dari walikota. Banyaklah itu..”  
(w.g.F4. 031112)

“Kita kan sudah didengungkan bebas biaya, jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Wajib Belajar sudah berjalan di sini. Bantuan dari pemerintah juga banyak. Yang paling mendukung dari semua tenaga pengajar mayoritas pendidikannya sudah S1.”  
(w.p.F4.02112012)

Matriks 4.2 Faktor Pendukung Terlaksananya Wajib Belajar 9 Tahun di Wilayah Penelitian

Komponen	Keadaan
Faktor-faktor pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bantuan langsung dari pemerintah seperti dana BOS.</li> <li>2. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan bantuan berupa seragam, alat tulis, sepatu dan bebas SPP.</li> <li>3. Mayoritas tenaga pengajar sudah sarjana.</li> <li>4. Adanya peran serta masyarakat berupa pemberian beasiswa dan bantuan.</li> <li>5. Masyarakat beranggapan pendidikan adalah hal yang penting.</li> </ol>
Hal yang harus ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan guru PNS dan tenaga tata usaha.</li> <li>2. Pemerataan guru dari sekolah atau kecamatan lain yang kelebihan guru.</li> </ol>

#### 1.2.1.5 Kendala dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun).

Pada dasarnya tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ini. Namun ada beberapa masalah yang masih dihadapi oleh ketiga kecamatan ini, antara lain rendahnya taraf hidup masyarakat sekitar yang menyebabkan terjadinya putus sekolah. Selain itu di kecamatan Teluk Betung Selatan dan Panjang masih mengalami kekurangan guru untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Daerah dan tenaga tata usaha.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan berikut ini:

“Kendala yang berat sepertinya tidak ada. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa sekolah yang kekurangan guru, jadi kalau bisa kami minta itu. Juga

gedung sekolah yang perlu penambahan atau renovasi kami berharap sekali bisa dapat bantuan.”

(w.kupt.F5.200712)

Kalau dari segi jumlah memang tidak cukup, karena kita ini kan di daerah pinggiran. Satu sisi di kecamatan lain penuh, tapi di sini kurang. Pemerataan guru sudah lama wacananya, tapi sampai sekarang belum terealisasi.

(w.p.F3. 291012)

“Terus terang kami kekurangan guru, seperti guru bahasa daerah, guru agama Islam dan guru penjaskes. Cukup banyak jumlahnya. Untuk sementara ini kami menerima guru honorer.”

(w.g.F4. 031112)

Hasil wawancara tersebut di atas didukung dengan dokumen dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan yang menyebutkan bahwa kekurangan guru di kecamatan ini mencapai 87 orang yang terdiri dari 55 orang guru umum, 3 orang guru agama, 9 orang guru olahraga dan 20 orang guru Bahasa Daerah Lampung. (Dokumen terlampir)

#### Matriks 4.3 Kendala dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Komponen	Keadaan
Kendala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekurangan guru</li> <li>2. Kekurangan ruang belajar</li> </ol>
Hal yang harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS.</li> <li>2. Penambahan ruang belajar dan renovasi sekolah.</li> <li>3. Pendataan ulang guru PNS untuk keperluan pemerataan guru.</li> </ol>

### **1.3 Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti akan mengungkapkan hasil temuan di lapangan berdasarkan masing-masing fokus penelitian sebagai berikut:

#### **1.3.1 Pendidikan Dasar pada Masyarakat Pesisir**

Pendidikan anak usia pendidikan dasar di wilayah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Animo masyarakat terhadap pendidikan sudah tinggi.
2. Masyarakat memandang pendidikan sebagai hal yang penting, karena itu mereka berusaha menyekolahkan anak-anak mereka paling tidak sampai lulus SMP.
3. Meskipun pendidikan adalah hal yang dianggap penting, namun apabila dibutuhkan orang tua akan menyuruh anak-anak mereka untuk membantu pekerjaan mereka. Hal ini membuat anak tidak masuk sekolah selama beberapa hari.
4. Bila anak-anak ini dibiarkan tidak masuk sekolah berkepanjangan mereka memiliki potensi untuk berhenti sekolah.

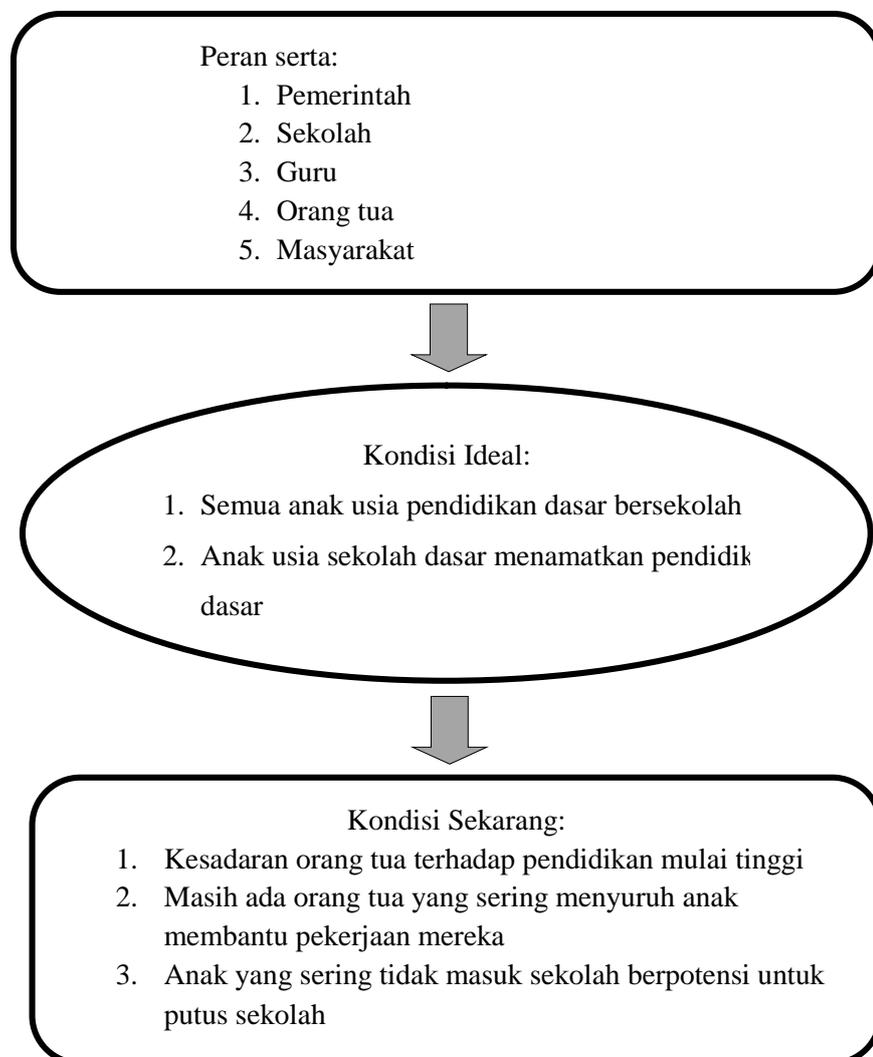
Hal yang harus ditingkatkan:

1. Pemerintah harus terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak.
2. Sekolah harus terus mengadakan pendekatan kepada orang tua yang sering menyuruh anak-anak untuk membantu pekerjaan mereka agar anak-anak tidak terlalu sering membolos dari sekolah misalnya

dengan melakukan kunjungan (*home visit*) kepada anak-anak yang sering membolos.

3. Guru-guru di sekolah harus terus mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi paedagogis sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menarik yang membuat anak murid merasa senang di sekolah.

Gambar 4.1 Pendidikan Dasar pada Masyarakat Pesisir



### 1.3.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

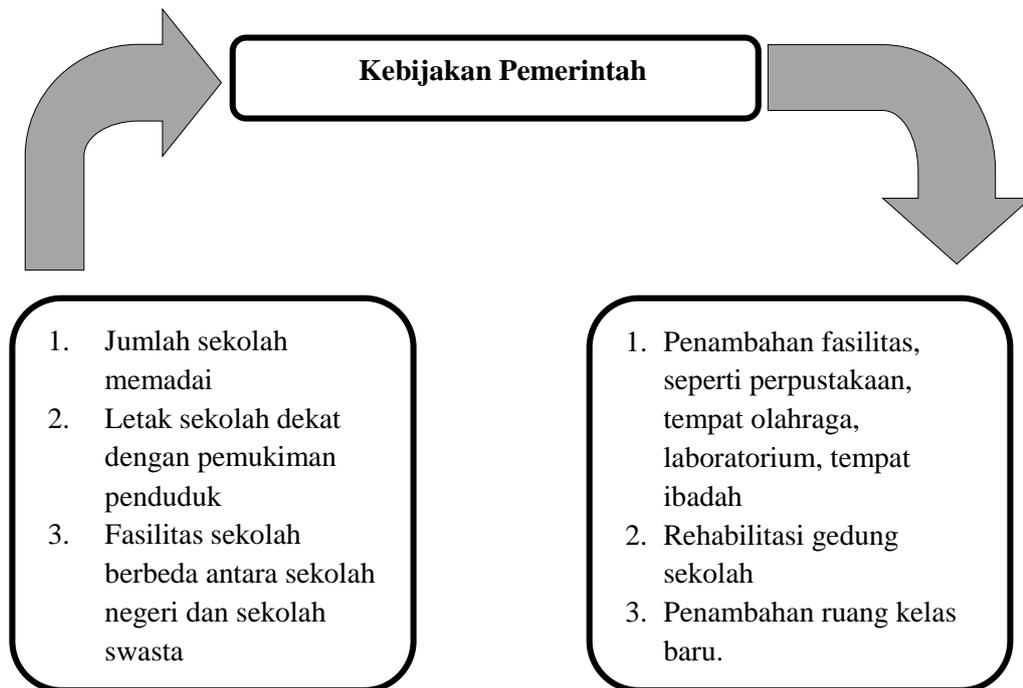
Informasi yang diperoleh mengenai sarana dan prasarana di wilayah penelitian ini adalah:

1. Sarana dan prasarana pendidikan di daerah pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung pada umumnya dalam cukup baik.
2. Beberapa bangunan sekolah yang penulis kunjungi sebagai sample berada di pemukiman padat penduduk sehingga mudah dijangkau.
3. Sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama tersebut dibangun secara permanen dan memiliki fasilitas yang cukup memadai.
4. Jumlah rombongan belajar jauh lebih banyak daripada jumlah ruang kelas.
5. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Dalam hal fasilitas sekolah-sekolah negeri di Kecamatan Teluk Betung Dasar memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap dibandingkan sekolah-sekolah swasta. Luas area sekolah negeri juga lebih luas daripada sekolah swasta.
6. Terdapat kegiatan Kejar Paket A dan Kejar Paket B serta Kelas Layanan Khusus di SD Negeri 1 Sukamaju.

Hal yang harus ditingkatkan:

1. Penambahan fasilitas, rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan ruang kelas baru harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Gambar 4.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung



### 1.3.3 Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan

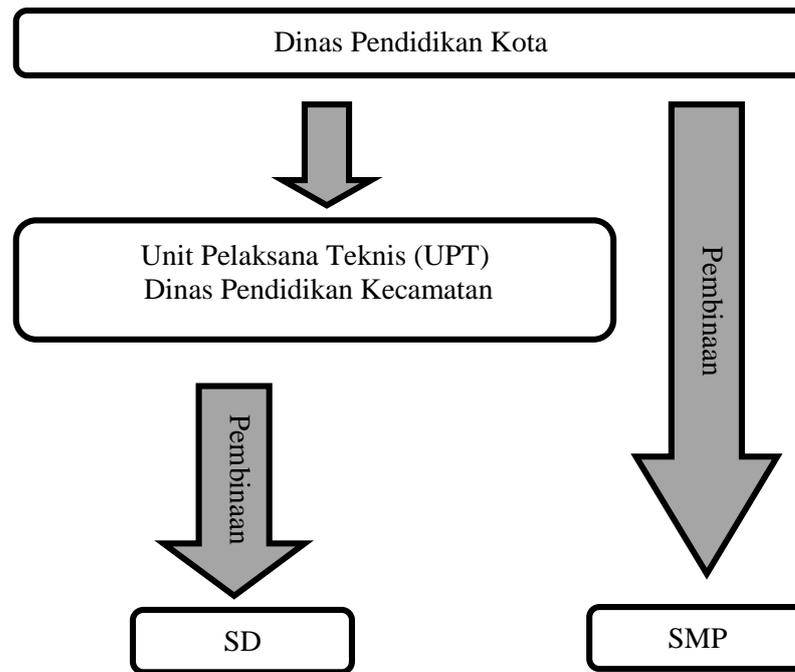
Dari wawancara yang dilakukan pada tiga orang informan kunci di tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan didapat informasi sebagai berikut:

1. Informasi yang berkaitan dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun disampaikan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota kepada kepala sekolah

2. Bantuan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan adalah berupa pembinaan yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Pembinaan ini dilakukan oleh pengawas pembina terhadap sekolah binaan mereka, yaitu kepada kepala sekolah, guru dan tenaga tata usaha.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan tidak memberikan bantuan yang berupa uang karena semua bantuan sudah disalurkan Dinas Pendidikan Kota langsung ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Hal-hal yang harus ditingkatkan antara lain:

1. Pengambilan kebijakan pendidikan di daerah pesisir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota hendaknya melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan.
2. Demikian pula pemberian bantuan oleh Dinas Pendidikan Kota kepada sekolah-sekolah hendaknya melibatkan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai dinas yang paling dekat posisinya dengan sekolah-sekolah.
3. Pembinaan terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi harus menjadi suatu program rutin.
4. Pembinaan terhadap guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, mutu dan kedisiplinan guru sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik.



Gambar 4.3 Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan

Pengawas pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan hanya melakukan pembinaan dan supervisi kepada sekolah dasar saja. Sedangkan untuk jenjang SMP pembinaannya ditangani oleh Pengawas Dinas Pendidikan Kota.

#### 1.3.4 Faktor-faktor Pendukung Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Dari wawancara dengan informan diketahui bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun didukung oleh:

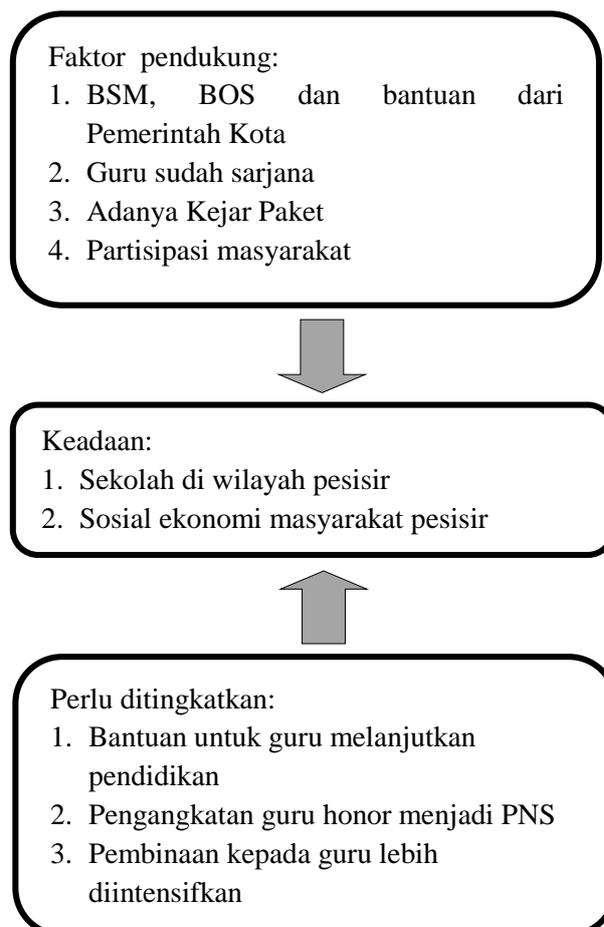
1. Adanya pemberian bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah kepada sekolah berupa dana BOS dan BOM.
2. Tenaga pendidik yang mayoritas sudah sarjana.
3. Peran serta masyarakat berupa pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu.

4. Anggapan masyarakat bahwa pendidikan adalah hal yang penting.
5. Jumlah dan letak sekolah mempermudah masyarakat untuk mendapat akses pendidikan.

Hal-hal yang harus ditingkatkan antara lain:

1. Pemberian bantuan bagi guru-guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Pengangkatan guru-guru honorer menjadi guru PNS.

Gambar 4.4 Faktor-faktor Pendukung Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Penelitian



Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010) yang menyatakan bahwa harus ada manajemen SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Paket A dan Paket B berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi Penyediaan pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi.

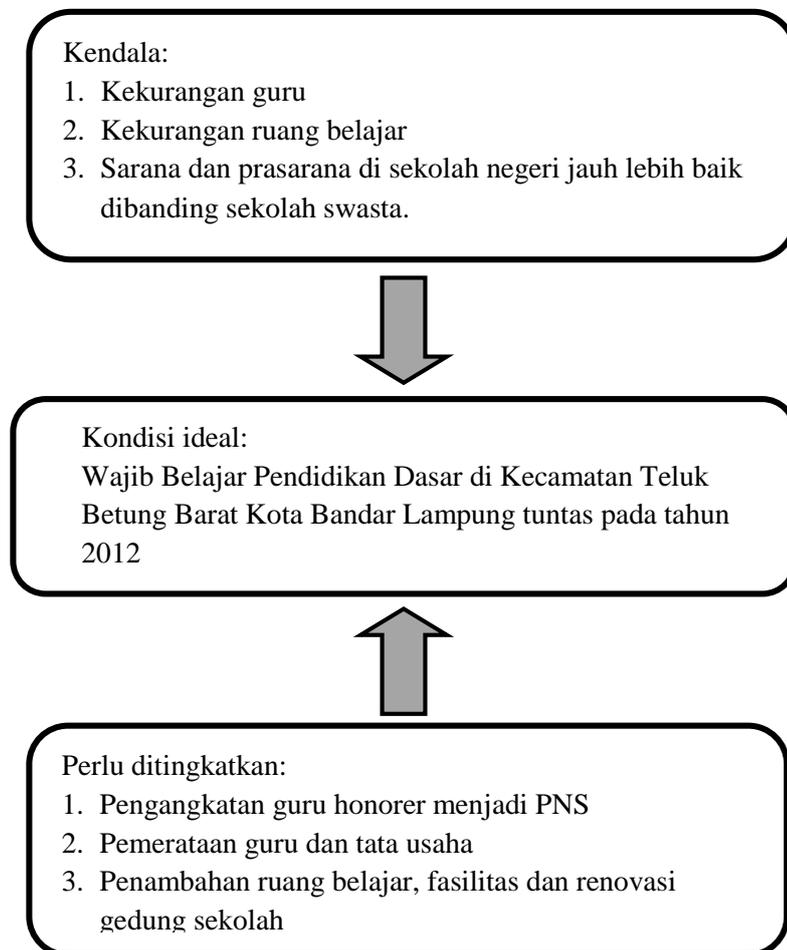
### **1.3.5 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.**

Dari informasi yang didapat dari wawancara dengan informan diketahui bahwa kekurangan guru adalah masalah yang paling banyak dikemukakan oleh para informan dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ini. Seperti yang terlihat dari dokumen Data Keadaan Ruang Kelas, Romjar, Kepsek dan Guru SDN, dinyatakan bahwa kekurangan untuk guru umum mencapai 55 orang, guru Agama 3 orang, guru olahraga 9 orang, dan guru bahasa Lampung 20 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Teluk Betung Barat kekurangan 87 orang guru. Selain itu kecamatan ini juga masih mengalami kekurangan tenaga tata usaha dan kekurangan ruang belajar.

Hal yang harus dilakukan adalah:

1. Pendataan ulang guru PNS untuk keperluan pemerataan guru.
2. Pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS.
3. Penambahan ruang belajar dan renovasi untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Gambar 4.5 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Wilayah Penelitian



## 1.4 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.4.1 Pendidikan Dasar pada Masyarakat Pesisir

Dari wawancara yang dilakukan terhadap para informan diketahui bahwa bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Teluk Lampung wilayah Kota Bandar Lampung pendidikan adalah hal yang penting. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka juga cukup tinggi. Dukungan orangtua murid terhadap pendidikan terlihat dari kemauan mereka untuk menyekolahkan anak

mereka paling tidak sampai lulus SMP. Selain karena faktor ekonomi yang membatasi orangtua untuk meneruskan pendidikan anak-anak mereka sampai lulus SMA, faktor lingkungan sangat berpengaruh pada pendidikan anak-anak di daerah pesisir. Anak-anak usia sekolah yang bergaul dengan anak-anak putus sekolah memiliki kecenderungan yang tinggi untuk terpengaruh, sehingga berakibat ikut putus sekolah. Selain itu kemungkinan anak-anak ini sudah mulai bekerja pada sektor-sektor informal seperti menangkap ikan atau menjadi buruh.

Meskipun demikian masih banyak anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. Hal ini dikarenakan faktor internal keluarga yaitu masalah ekonomi. Meskipun pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan namun peserta didik masih harus menanggung biaya pribadi seperti biaya transportasi dan pembelian baju seragam.

Data sekunder dari Kepala Tata Usaha di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan menunjukkan bahwa pada tingkat Sekolah Dasar jumlah siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan siswa perempuan. Sementara itu untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama jumlah siswa perempuan lebih banyak dibandingkan siswa laki-lakinya. Hal ini dimungkinkan karena bagi banyak keluarga di daerah pesisir, terutama keluarga nelayan, anak laki-laki adalah salah satu sumber pendapatan keluarga. Banyak di antara mereka yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena harus membantu orang tua mereka mencari nafkah.

Hal tersebut sejalan dengan (Fattah, 2004) yang menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan, yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan, seperti:
  - a. Tujuan pendidikan: berubahnya tujuan pendidikan ke arah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
  - b. Pendekatan yang digunakan: praktek bengkel dan laboratorium lebih menuntut banyak biaya dibandingkan metode lain.
  - c. Materi yang disajikan: praktek lebih menuntut banyak biaya dibandingkan penyampaian teori.
  - d. Tingkat dan jenis pendidikan: biaya pendidikan di Sekolah Dasar berbeda dengan di Sekolah Menengah.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor yang ada di luar sistem pendidikan, seperti:
  - a. Berkembangnya demokrasi pendidikan. Di Indonesia demokrasi pendidikan dirumuskan dalam pasal 31 UUD 1945. Sebagai konsekuensinya Pemerintah harus menyediakan dana yang cukup untuk perkembangan pendidikan.
  - b. Kebijakan pendidikan. Agar tiap warga negara dapat memperoleh pendidikan maka Pemerintah memberikan fasilitas berupa pembiayaan untuk pembangunan gedung, kenaikan gaji guru dan lain-lain.
  - c. Tuntutan akan pendidikan, dari segi kualitas naiknya keinginan untuk memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, segi kuantitas banyak orang yang menginginkan pendidikan.
  - d. Inflasi: menurunnya nilai mata uang suatu negara sangat berpengaruh pada biaya pendidikan karena harga satuan biaya mengikuti kenaikan inflasi.

Faktor lingkungan juga berpengaruh pada anak usia pendidikan dasar. Dari wawancara dengan siswa di daerah penelitian diketahui bahwa banyak anak yang tidak sekolah karena teman-teman sepermainan mereka juga tidak bersekolah.

#### **4.4.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dalam Bab XII Pasal 45 ayat 1 dinyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan formal dan informal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.” Pasal ini dengan tegas mengungkapkan pentingnya sarana dan prasarana dalam setiap satuan pendidikan untuk mendukung berjalannya proses belajar mengajar secara efektif.

Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII Pasal 42 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan tempat/ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkualitas.

Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

1. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan

komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Sarana pendidikan adalah segala macam peralatan langsung yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran dalam pencapaian makna dan tujuan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah memberikan pengaruh yang besar terhadap kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dari hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, pada umumnya kondisi fisik sekolah-sekolah tersebut cukup kokoh dan memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa bangunan sekolah yang penulis kunjungi sebagai sample berada di lingkungan yang dekat jalan raya dan lingkungan padat penduduk. Sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama tersebut sudah dibangun secara permanen dan memiliki fasilitas yang cukup memadai. Setiap sekolah memiliki ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha dan ruang perpustakaan. Semua sekolah berlantai keramik meskipun beberapa sekolah ada yang lapangannya masih berupa tanah, sehingga pada waktu hujan menjadi becek.

Pada umumnya sekolah dan ruang kelas yang ada di kecamatan ini sudah cukup menampung siswa yang ada. Namun masih ada beberapa sekolah yang kekurangan ruang belajar. Demikian pula jumlah tenaga pendidikan, menurut data yang terkumpul, masih kekurangan 87 orang guru, yang meliputi untuk guru umum mencapai 55 orang, guru Agama 3 orang, guru olahraga 9 orang, dan guru bahasa Lampung 20 orang.

#### **4.4.3 Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan**

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan diketahui bahwa sebagai UPT Dinas Pendidikan Kecamatan tidak lagi melakukan sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun lagi karena program ini sudah berjalan lama. Semua informasi yang berkaitan dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah disampaikan langsung kepada kepala sekolah.

Demikian pula dalam hal bantuan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan memang tidak memberikan bantuan berupa uang kepada sekolah untuk mendukung terlaksananya program ini. Hal ini dikarenakan semua bantuan dari pemerintah sudah langsung disalurkan lewat sekolah. Meskipun demikian Dinas Pendidikan Kecamatan tidak lepas tangan terhadap tercapainya program ini. Mereka masih melakukan pembinaan kepada sekolah binaan mereka, yaitu kepada kepala sekolah, guru dan tenaga tata usaha. Kegiatan ini biasanya

dilakukan di awal tahun ajaran dengan melibatkan pengawas pembina di kecamatan tersebut.

Sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang paling dekat dengan sekolah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan seharusnya ikut dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Dalam hal perencanaan, struktur penduduk harus menjadi pertimbangan tersendiri. Menurut Usman (2006:74-79) ada empat pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan kebutuhan sosial, pendekatan ketenagakerjaan, pendekatan untung rugi dan pendekatan keefektifan biaya.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah suatu program yang melakukan pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan ini adalah pendekatan yang didasarkan oleh keperluan masyarakat pada saat ini yang menitikberatkan pada pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Namun ada beberapa kelemahan pendekatan ini seperti (1) mengabaikan sumber daya yang dibutuhkan karena beranggapan bahwa penggunaan sumber daya pendidikan yang terbaik adalah untuk segenap rakyat Indonesia, (2) mengabaikan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kurang dibutuhkan masyarakat, (3) lebih mengutamakan kuantitas lulusan dibanding kualitas.

#### **4.4.4 Faktor-faktor Pendukung Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Yang menjadi faktor-faktor pendukung terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ini antara lain adanya bantuan langsung dari pemerintah seperti BSM dan BOS, bantuan sumbangan biaya pendidikan, seragam sekolah, buku dan sepatu oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta tenaga pengajar yang mayoritas sudah sarjana.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan Depdiknas (2006), yang mencanangkan pemerataan dan perluasan akses melalui penguatan program sebagai berikut:

1. Pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar.
3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Perluasan pendidikan wajib belajar pada jalur nonformal

#### **4.4.5 Kendala dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Teluk Betung Barat ini antara lain adalah rendahnya taraf hidup masyarakat yang menyebabkan terjadinya putus sekolah. Selain itu kecamatan ini masih mengalami kekurangan 87 orang guru untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Daerah, Pendidikan Agama, dan guru kelas.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen dari total APBN atau APBD. Anggaran minimal tersebut

adalah di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Namun sampai saat ini pemerintah pusat masih salah persepsi terkait pengalokasian dana tersebut. Rivai & Murni (2010) menyatakan bahwa selama ini pemerintah masih memasukkan gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dalam anggaran pendidikan sehingga mengurangi anggaran untuk kebutuhan operasional pendidikan. Lebih dari setengah APBN tersebut habis untuk membayar gaji guru. Hal itu berimbas pada kurangnya dana pendidikan yang dimiliki pemerintah sehingga pendidikan menjadi tidak gratis dan masyarakat ekonomi lemah tidak sanggup memenuhinya.